



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan

Telepon : 021-5224658, Faksimili : 021-5225044

Website : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) email : [keuangan.imigrasi@gmail.com](mailto:keuangan.imigrasi@gmail.com)

Nomor : IMI - KU.01.05- 5686  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran TA. 2017

12 Desember 2017

Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan  
di-

Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. DIPA Induk Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.0/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 1753-0824-7081-4081;
- c. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Nomor SP DIPA-013.06.2.408922/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 1182-9057-3091-5522;
- d. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Nomor SP DIPA-013.06.2.409108/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 6579-0547-6283-0991;
- e. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Nomor SP DIPA-013.06.2.408046/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 3628-7991-8010-8060;
- f. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Nomor SP DIPA-013.06.2.408573/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 7808-9618-9631-9477;
- g. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan Nomor SP DIPA-013.06.2.408485/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 9041-7790-1283-2000;
- h. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Nomor SP DIPA-013.06.2.408128/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 0283-9304-6647-1603;
- i. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Agam Nomor SP DIPA-013.06.2.652393/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 0987-2994-8207-5089;
- j. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau Nomor SP DIPA-013.06.2.409145/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 3124-4054-2080-6445;
- k. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Sambas Nomor SP DIPA-013.06.2.662967/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 7141-9250-02006-4240;
- l. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Nomor SP DIPA-013.06.2.109158/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 4458-0703-2140-6395;
- m. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Lhok Seumawe Nomor SP DIPA-013.06.2.408040/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 0604-1236-7586-5901;
- n. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Langsa Nomor SP DIPA-013.06.2.409026/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 4740-9607-8383-3594;
- o. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Sabang Nomor SP DIPA-013.06.2.627323/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 8210-7396-0806-6168;
- p. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga Nomor SP DIPA-013.06.2.408981/2017



- r. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi Nomor SP DIPA-013.06.2.683111/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 8397-8370-4100-0461;
  - s. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau Nomor SP DIPA-013.06.2.686553/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 8029-5914-1009-4252;
  - t. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi Nomor SP DIPA-013.06.2.686549/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 0016-8236-5074-7522;
  - u. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas III Takengon Nomor SP DIPA-013.06.2.683533/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 7164-602-6401-4958;
  - v. DIPA Petikan Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan Nomor SP DIPA-013.06.2.664654/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 7650-9907-0370-6367;
  - w. DIPA Petikan Rumah Detensi Imigrasi Medan Nomor SP DIPA-013.06.2.664586/2017 tanggal 07 Desember 2016 kode *Digital Stamp* 5135-8040-4045-6674;
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
    - a. Pemenuhan kekurangan pagu Belanja Pegawai TA. 2017 pada Satuan Kerja Keimigrasian;
    - b. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas;
    - c. Mempercepat percepatan pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas Kementerian/Lembaga;
  3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kategori revisi adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
    - b. Jenis revisi adalah:
      - 1) pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*output*) yang sama, 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
      - 2) pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*output*) yang sama, 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan 1 (satu) Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama;
  4. Rincian pergeseran anggaran Satuan Kerja Keimigrasian adalah sebagai berikut:
    - a. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III (tiga) DIPA:
      - 1) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta;
      - 2) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai;
      - 3) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
      - 4) Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh;
      - 5) Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan;
      - 6) Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang;
      - 7) Kantor Imigrasi Kelas II Agam;
      - 8) Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau;
      - 9) Kantor Imigrasi Kelas II Sambas;
      - 10) Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin;
      - 11) Kantor Imigrasi Kelas II Lhok Seumawe;
      - 12) Kantor Imigrasi Kelas II Langsa;
      - 13) Kantor Imigrasi Kelas II Sabang;
      - 14) Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga;
      - 15) Kantor Imigrasi Kelas III Tarempa;
      - 16) Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi;
      - 17) Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau;
      - 18) Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi;
      - 19) Kantor Imigrasi Kelas III Takengon;



- b. Pergeseran rincian anggaran berupa pengurangan anggaran pada *Output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp.1.357.295.000,- pada:

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	102,300,000
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	304,696,000
3	Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan	45,000,000
4	Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang	65,175,000
5	Kantor Imigrasi Kelas II Agam	57,267,000
6	Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau	80,800,000
7	Kantor Imigrasi Kelas II Sambas	21,700,000
8	Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin	94,770,000
9	Kantor Imigrasi Kelas III Tarempa	58,000,000
10	Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	71,746,000
11	Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau	20,710,000
12	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	303,411,000
13	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	131,720,000
<b>Jumlah (Rp)</b>		<b>1,357,295,000</b>

- c. Pergeseran rincian anggaran tersebut di atas menyebabkan penambahan anggaran pada *Output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.1.357.295.000,- pada:

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	523,428,000
2	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	233,000,000
3	Kantor Imigrasi Kelas II Lhok Seumawe	219,000,000
4	Kantor Imigrasi Kelas II Langsa	42,000,000
5	Kantor Imigrasi Kelas II Sabang	163,738,000
6	Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga	93,477,000
7	Kantor Imigrasi Kelas III Takengon	26,000,000
8	Rumah Detensi Imigrasi Medan	56,652,000
<b>Jumlah (Rp)</b>		<b>1,357,295,000</b>

- d. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terdapat penambahan anggaran pada *output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.137.080.000,- untuk pemenuhan kebutuhan tersebut diambil dari *output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp.137.080.000,-
- e. Pada Kantor Imigrasi Kelas III Takengon terdapat penambahan anggaran pada *output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.48.400.000,- untuk pemenuhan kebutuhan tersebut diambil dari *output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 48.400.000,-
5. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa:
- Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
  - Form RKA A,B, dan D sebagaimana daftar terlampir;
  - Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L;
  - Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Surat Persetujuan Eselon I;
  - Data dukung lainnya.



Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,



Ronny F. Sompie  
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banda Aceh;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara;
8. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau;
11. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Riau;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau;
14. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat;
17. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung;
20. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
23. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta;
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali;
26. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat;
29. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan;
32. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan;
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
34. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur;
35. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur;
36. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
37. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara;
38. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara.